IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Camat di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Neneng Kustiawati¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang implementasi peraturan walikota nomor 32 tentang tugas pokok dan fungsi camat di Kecamatan Balikpapan Utara kota Balikpapan, dengan fokus mengenai implementasi peraturan walikota nomor 32 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi camat di kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Camat di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Artikel ini beragumen bahwa faktor utama yang menghambat implementasi pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan adalah minimnya camat berkoordinasi dengan bawahannya sehingga para pegawai bekerja tanpa adanya koordinasi.

Kata Kunci : *implementasi, peraturan walikota, Balikpapan.*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan satu di antara yang sedang berkembang dan giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dalam rangka asas dekonsentrasi, wilayah negara kesatuan republik indonesia di bagi dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kotamadya. Kemudian wilayah kabupaten dan kotamadya dibagi dalam wilayah-wilayah kecamatan yang dipimpin oleh masing-masing kepala wilayah. Camat adalah seorang yang mempunyai kedudukan sebagai kepala yang memimpin penyelenggaraan di tingkat kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah (Walikota).

¹ Materi artikel ini berasal dari artikel yang ditulis dari pengarang di atas email: neneng_kustiawati@yahoo.co.id

Adapun wewenang tugas dan kewajiban kepala daerah sebagaimana telah dikemukakan dalam UU NO. 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditentukan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan persturan perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas yang sangat essenisal di dalam asas dekonsentrasi ini adalah pelimpahan wewenang oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, sedangkan pengertian asas desentralisasi dimana pemerintah menyerahkan wewenang kepada pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerrintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diharapkan dengan penyerahan wewenang ini pemerintahan daerah dapat meningkatkan pembangunan daerahnya.

Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah dengan Camat sebagai kepalanya tetap eksis. Dalam hubungan ini Kecamatan adalah unit kerja, organisasi, wadah yang berada langsung dibawah kepala daerah dibentuk langsung berdasarkan peraturan daerah dan melaksanakan kewenang yang dilimpahkan (bukan dserahkan) oleh bupati/walikota untuk dilaksanakan langsung di dalam lingkungan tugasnya.

Status kecamatan yang dikepalai oleh Camat sebagai kepala wilayah kecamatan memegang fungsi lini, bukan staf dan merupakan unsur pelaksana urusan-urusan dekonsentrasi di daerah kabupaten/kota.

Artikel ini menyuruti Implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009 dengan berfokus pada pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan, yaitu fungsi Camat sebagai kepala pemerintahan yang mengatur agar pembagian kerja atau kegiatan (aktifitas) dari berbagai orang maupun kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara efisien. Artikel ini beragumen mengenai fungsi Camat de Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, serta faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi Peraturan Wlikota No.32 Tahun 2009 tersebut.

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih 2(dua) minggu, dianalisis dengan analisis kualitatif. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara terhadap informan serta pengamatan secara langsung di lapangan.

Agar analisis ini memiliki pijakan teoritis, pada bagian berikutnya akan dibahas terlebih dahulu kerangka dasar teori sebelum memfokuskan pembahasan tentang peranan sistem informasi manajemen berbasis komputer tersebut. Adapun peranan sistem informasi manajemen berbasis computer tersebut akan dicoba untuk dipaparkan.

Kerangka Dasar Teori

Untuk lebih mudah dalam memahami pengertian implementasi kebijakan Lineberry (1978) dalam Fadilah Putra (2003:81) menspesifikasikan proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelksanan
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standar operating procedures/SOP*)
3. Koordinasi berbagai berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/badan pelaksana
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan

Menurut Sahartier dalam Wahab (204:51) implementasi dapat dikatakan *Temuan menunjukkan bahwa* sebagai suatu untuk memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Yakni kejadian dari kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedomannya kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Sedangkan proses implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan telah ditetapkan dalam bentuk program-program dengan memperhatikan kelemahan peluang dan kemungkinan resiko terkecil sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu melibatkan berbagai unsur (*stake holders*) sehingga hasil keputusan melahirkan prosedur yang mewakili semua kepentingan.

Sedangkan proses implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan telah ditetapkan dalam bentuk program-program dengan memperhatikan kelemahan peluang dan kemungkinan resiko terkecil sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu melibatkan berbagai unsur (*stake holders*) sehingga hasil keputusan melahirkan prosedur yang mewakili semua kepentingan.

Pengertian Camat

Camat sebagai kepala pemerintahan adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja atau kegiatan (aktifitas) dari berbagai orang maupun kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara efisiensi dan dilakukan oleh camat agar dapat terorganisasi dengan baik dan benar dalam melakukan tugas-tugas dengan benar.

Tugas camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat 2 dan 3 yaitu :

“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.”

dan

“Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau Kelurahan”.

Adapun fungsi dari Camat tersebut di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dalam bidang pemerintahan adalah:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan purundang-undangan;
- e. Pengkooordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayananan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;

- j. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan atau pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kebijakan

Sebelum memahami implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu dipahami secara singkat apa yang dimaksud dengan kebijakan publik itu sendiri. Menurut Dye (dalam Pasolong, 2007) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pejabat pemerintah saja.

Pengertian kebijakan itu menurut Kartasasmita (dalam Widodo 2001) merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) Apa yang dilakukan (tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) Apa yang menyebabkan dan mempengaruhinya, (3) Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut, sedangkan menurut Anderson dalam Islamy (1994:19) dalam buku yang sama mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Pemerintah Dalam Arti Luas

Pemerintahan adalah salah satu syarat adanya suatu negara. Di dalam pemerintahan sebagai suatu proses, maka kita dapat dua macam kegiatan pokok yaitu sebagai kegiatan politik (*politics*) dan kegiatan administrasi (*public administration*).

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu menggerakkan orang-orang dalam kharismatis retorika, administrator dan menjalankan roda pemerintahan atau kekuasaan kepemimpinan, atau seni sastra kemampuan menciptakan, mengkarsakan dan merasakan surat-surat keputusan yang berpengaruh, atau juga bagaimana kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon yang harus dimiliki pemerintah sebagai penguasa.

Pemerintah berasal dari kata perintah yang artinya sesuatu yang harus dilakukan atau perbuatan menyuruh untuk melakukan sesuatu. Pemerintahan memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki saling hubungan, yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Definisi Camat

Camat sebagai kepala pemerintahan adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja atau kegiatan (aktifitas) dari berbagai orang maupun kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara efisiensi dan dilakukan oleh camat agar dapat terorganisasi dengan baik dan benar dalam melakukan tugas-tugas dengan benar.

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009 tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
- b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Adapun fungsi dari Camat tersebut di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dalam bidang pemerintahan adalah:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumserta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan purundang-undangan;
- e. Pengkooordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayananan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- j. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan atau pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pengkoordinasiaan adalah satu cara untuk menyatu padukan organisasi di tingkat pemerintahan supaya tujuan organisasi tepat pada sasaran sehingga menjalankan roda pemerintah dengan baik. Pengkoordinasiaan mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi itu tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakan saja, tetapi menurut aturan sehingga menyumbang

terhadap pencapaian tujuan. Selain itu, organisasi pemerintahan juga harus melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Waikota. Camat merupakan pemimpin dalam sebuah kecamatan, oleh karena itu sebagai pemimpin wajib memberikan penugasan melalui koordinasi dengan bawahan-bawahannya. Yang selanjutnya adalah bawahan sebagai pelaksana tugas. Koordinasi antara kedua belah pihak tersebut merupakan kegiatan organisatif dalam suatu pemerintahan.

Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Camat Balikpapan Utara adalah mengimplementasikan kebijakan berdasarkan koordinasi kepada pegawai-pegawainya. Hal tersebut sesuai dengan keberadaan sumber daya manusia yang menjadi faktor pendukung dalam sebuah pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Camat selaku kepala pemerintahan di tingkat Kecamatan sering melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan bawahan dan kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Camat sering berkoordinasi dengan Lurah. Dalam hal ini Camat sangat bertanggung jawab terhadap fungsinya.

Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya memberikan motivasi/dorongan kepada masyarakat agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Rakyat berada dalam posisi yang tidak berdaya (*powerless*). Posisi yang demikian memberi ruang yang lebih besar terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi terhadap pelanggaran hak-hak rakyat. Dengan demikian rakyat harus diberdayakan sehingga memiliki kekuatan posisi tawar (*empowerment of the powerless*). Pemberdayaan (*empowerment*) dalam studi kepustakaan memiliki kecenderungan dalam dua proses. Pertama proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya dan kedua menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat makin tergantung pada program-program pemberian (*charity*). Karena tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan dengan sarannya adalah masyarakat yang terpinggirkan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi. Yang intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya kepada instansi-instansi pemberi pelayanan. Dalam ini dapat dikatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kekuatan terhadap rakyat agar memiliki posisi tawar terhadap negara. Posisi tawar ini selanjutnya menjadi kekuatan untuk mengontrol kekuasaan negara dalam menyelenggarakan manajemen pemerintah, sehingga hak-hak rakyat tidak tereksploitasi dan dapat berpartisipasi secara aktif dan bebas.

Pengkoordinasian untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat guna meningkatkan taraf hidupnya. Namun dalam hal ini Camat kurang terlibat langsung apa yang sudah di amanatkan dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009 dalam pengkoordinasi tersebut Camat sering mewakilkan bawahannya. Dalam pemberdayaan masyarakat Balikpapan Utara Camat tidak berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Camat hanya mengirimkan bawahannya sehingga hubungan pemerintah Kecamatan dengan masyarakat kurang maksimal.

Dalam hal pengkoordinasian untuk pemberdayaan masyarakat kurang aktif dan Camat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat dalam hal ini Camat Balikpapan Utara bekerja tidak sesuai dengan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009 Tentang Fungsi Camat di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sehingga kegiatan yang menyangkut dengan fungsi Camat tidak berjalan dengan maksimal salah satunya pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Program yang mengikutsertakan masyarakat, memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan seperti ini, terdapat dua pihak yang memiliki hubungan yang sangat erat yaitu pertama, pihak yang memberdayakan (*Community Worker*) dan kedua, pihak yang diberdayakan

(masyarakat). Antara kedua pihak harus saling mendukung sehingga masyarakat sebagai pihak yang akan diberdayakan bukan hanya dijadikan objek, tapi lebih diarahkan sebagai subjek (pelaksana). Pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, yang secara potensial dimiliki. Disamping itu secara bertahap masyarakat juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk mengambil peran yang sejajar dengan mereka yang lebih berdaya melalui proses penyadaran.

Namun terdapat perbedaan dengan apa yang diutarakan oleh masyarakat kecamatan Balikpapan Utara, berdasarkan pada apa yang telah dilaksanakan menurut masyarakat masih ada beberapa hal yang bersifat kurang, baik permasalahan koordinasi yang kemudian berujung pada pelaksanaan sistem dan implementasi kegiatan-kegiatan.

Dalam pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kurang dan Camat dalam kegiatan tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah di bawahnya sehingga masyarakat Balikpapan Utara banyak yang mempunyai bakat untuk membuat suatu kegiatan tetapi tidak di dukung oleh pemerintah Kecamatan setempat walaupun ada kegiatan pemberdayaan Camat tidak pernah terlibat langsung. Dari hasil penelitian dan observasi penulis bahwa dalam pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kurang efektif, fungsi Camat tidak berjalan dengan efektif karena dalam pengkoordinasian Camat tidak terlibat langsung dalam pengkoordinasian tersebut bahkan Camat mengutus pegawainya yang kurang paham di bidang tersebut sehingga banyak masyarakat yang mampu dalam hal tersebut tetapi tidak diberdayakan oleh pemerintah setempat. Seharusnya dalam hal ini Camat berkoordinasi dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Camat tidak berkoordinasi dengan kepala seksi kesejahteraan sosial melainkan Camat langsung mengutus pegawainya yang tidak berkompeten dalam penyelenggaraan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat untuk melakukan semua urusan atau melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat sehingga semua kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balikpapan Utara tidak berjalan efektif dan akurat dan bahkan tidak merata.

Berdasarkan pendapat beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa fungsi Camat kurang efektif dan dalam melakukan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat Camat hanya mengutus bawahannya yang tidak berkompeten di bidangnya untuk melakukan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat.

Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Administrasi Pertanahan dan Kependudukan di Wilayah Kecamatan

Dalam rangka menciptakan tertib kependudukan di daerah Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang memiliki kepadatan penduduk, Pemkot Balikpapan Merbitkan Implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Camat. Pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan di bidang administrasi, pertanahan dan kependudukan sangat di perlukan supaya penyelenggaraan tersebut berjalan dengan efektif dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat berjalan dengan baik sehingga masyarakat berurusan dengan pemerintah juga merasa di istimewaakan supaya masyarakat percaya terhadap lapangan.

Camat tidak berkoordinasi dengan pegawainya yang terkait dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan pertanahan sehingga urusan masyarakat masih belum jelas karena tidak ada pengkoordinasian dari Camat terhadap pegawai terkait, banyak urusan masyarakat terbengkalai. Contoh konkritnya adalah kekurangan pegawai tersebut menyebabkan banyaknya pekerjaan yang tertunda sehingga kepentingan masyarakat juga harus tertunda. Di lain hal minimnya fasilitas juga mempengaruhi, namun hal yang paling utama adalah lambannya kinerja petugas-petugas kecamatan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diimplementasikan melalui Implementasi Peraturan Walikota no. 32 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Camat di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah bermacam-macam. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pelayanan administrasi di bidang pertanahan dan kependudukan. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk di wilayah Balikpapan Utara Kota Balikpapan masih di pungut biaya. Namun disamping itu unsur kecepatan, ketepatan, dan kemudahan dalam pelayanan pun harus diperhatikan. Dalam pelayanan di bidang pertanahan Camat kurang pengkoordinasian dengan pegawainya sehingga pegawai-pegawai bekerja di bidang tersebut tidak punya acuan hingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat dan tidak maksimal. Disamping itu Camat juga tidak melakukan pemberdayaan dengan pegawainya terutama staf dibidang pertanahan. Contohnya dalam hal pelaksanaan standar operasional sebuah tugas semisal pembuatan KTP dan akta tanah. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan yang juga seadanya dari pegawai-pegawai Kecamatan Balikpapan Utara. Apabila terjadi ketidak seahaman mengenai kerja dan tugas maka akan terjadi keterlambatan dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dari yang seharusnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi Camat yang seharusnya berlangsung dengan baik harus mengalami hambatan, hambatan tersebut menyebabkan banyak permasalahan yang muncul. Camat kurang berkoordinasi dengan pegawai - pegawai terutama Kepala Seksi Pemerintahan terkait sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal dan masyarakat banyak protes

dengan pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara karena kami sebagai Camat tidak melakukan pengkoordinasian dengan kepala Urusan maupun kepala seksi pemerintahan. Dari hasil penelitian dan observasi penulis bahwa dalam hal pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan tidak maksimal karena dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan, Camat kurang melakukan koordinasi bahkan tidak melakukan koordinasi sama sekali karena itu pegawai Kecamatan bekerja tanpa instruksi karena tidak ada kejelasan dari Camat dalam memberikan kewenangan terhadap pegawainya, sehingga pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan kurang efektif.

Camat Balikpapan Utara menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan apa yang sudah di amanatkan karena Camat kurang berkoordinasi bahkan bisa dibbilang hampir tidak pernah melakukan koordinasi dengan kepala seksi pemerintahan dan pertanahan, Camat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum, sehingga banyak kegiatan atau urusan yang ada di Kecamatan Camat tidak terlibat langsung seperti pengkoordinasian untuk pemberdayaan masyarakat dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan, oleh sebab itu pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan adalah semua fasilitas yang di butuhkan Kecamatan Balikpapan Utara semuanya sudah terpenuhi. Para instansi Kecamatan melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan fungsi mereka masing-masing dan fasilitas yang di sediakan oleh pihak Kecamatan juga bisa membuat masyarakat nyaman dalam melakukan menyelesaikan kepentingan berupa mengurus kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga.

Disamping itu faktor pendukung dari Implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Camat di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan adalah semua fasilitas di Kecamatan Balikpapan Utara sudah terpenuhi dan masyarakat juga di layani dengan baik oleh pihak Kecamatan dalam hal ini masyarakat di layani oleh pegawai Kecamatan Balikpapan Utara bukan melayani pegawai Kecamatan Balikpapan Utara.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Camat di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan kurangnya kemampuan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai di akibatkan kurangnya sumber daya manusia. Fasilitas yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara belum terpenuhi semuanya hal ini terlihat dengan tidak adanya toilet umum untuk masrakat yng sedang mengurus kepentingan.

Penutup

Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Camat selalu berkoordinasi dengan Sekertaris Camat dan Kepala Urusan Pemerintahan untuk mensinkronisasi satuan kerja dan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi. Camat selaku kepala pemerintahan di tingkat Kecamatan sering melakukan koordinasi dengan bawahannya dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009. Camat Balikpapan Utara juga sering melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kecamatan walaupun koordinasi tersebut Camat hanya mengutuskan bawahannya, dalam hal ini Camat menjalankan fungsinya kurang efektif.

Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Pengkoordinasiaan untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat tetapi dalam hal ini Camat tidak berkoordinasi dengan bawahannya terutama dengan kepala seksi urusan kesejahteraan masyarakat, melainkan langsung mengutus pegawainya yang tidak berkompeten dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dan guna meningkatkan taraf hidupnya. Namun dalam hal ini Camat kurang terlibat langsung apa yang sudah di amatkan dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009 Tentang Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Camat di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Camat tidak pernah terjun langsung dalam pemberdayaan masyarakat disamping itu Camat kurang berkoordinasi dengan kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan Camat hanya mewakili bawahannya untuk mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Administrasi Pertanahan dan Kependudukan di Wilayah Kecamatan. Dalam pengkoordinasian penyelenggaraan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan kurang melakukan koordinasi dengan pegawainya terutama dengan kepala seksi bidang pertanahan sehingga masyarakat yang mengurus administrasi pertanahan masih ada kesimpangsiuran. Camat jarang mengadakan rapat dengan bawahannya

sehingga bawahannya bekerjasesuai dengan instruksi apa adanya dr Camat dan disamping itu Camat hanya tanda tangan saja tanpa terjun langsung kepegawainya sehingga para pegawai bekerja tidak terpacu dengan kebijakan siapapun karena Camat kurang melakukan pengkoordinasian oleh karena itu masyarakat tidak merasa puas dengan peleyan-pelayanan dari pemerintah Kecamatan.

Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota No. 32 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Camat di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan adalah :

Faktor Pendukung, masyarakat tidak mengalami kesusahan asalkan semua persyaratan yang telah di tentukan oleh di dipenuhi oleh masyarakat, dan di samping itu fasilitasnya berupa kursi tunggu juga sudah terpenuhi. Dalam pembuatan kartu tanda penduduk sekarang masyarakat bisa memilih sendiri kapan waktu kartu tanda penduduk tersebut di inginkan atau selesai tanpa harus menunggu waktu lama lagi atau kurang lebih 2 minggu kartu tanda penduduk tersebut jadi.

Faktor Penghambat, tidak adanya prasarana fasilitas umum dalam hal ini kamar mandi umum (toilet) untuk masyarakat yang sedang berkepentingan untuk mengurus kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk (KTP) jadi apabila masyarakat ingin menggunakan kamar mandi (toilet) maka masyarakat harus ke toilet umum didalam pasar atau mereka menggunakan toilet khusus pegawai kantor Kecamatan Balikpapan Utara dan belum terpenuhi semuanya diantara kursi tunggu untuk masyarakat yang sedang mengurus Kartu keluarga dan membuat kartu tanda penduduk. Camat kurang memperhatikan kinerja dari para pegawainya sehingga ada beberapa pegawai yang yang bekerja seenaknya saja bahkan ada pegawai yang lebih memilih memainkan handphone ketimbang memperhatikan atau menggubris masyarakat yang sedang membutuhkan petunjuk dari pegawai tersebut. Kurangannya sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai dan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh satu orang harus dikerjakan oleh beberapa orang dan waktu yang dibutuhkan juga lebih lama atau tidak selesai tepat pada waktunya. Banyak dari para pegawai yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solikin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Perkasa, Jakarta
- Ahmad Thoha. 1992. *Birokrasi Pemerintahan*, Pradnya Paramiha, Jakarta
- Anonim, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Arikunto, Suharsini. 2001. *Prosedur Penelitian*. Rineka Capta, Jakarta
- Bangin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Ed. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dunn, W. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Dwidjowijoto, Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta
- J. Meleo, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdikarya
- Kortono, Kartoni, Dr. Pemimpin dan Kepemimpinan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006:361
- Miles, Mathew B. Dan A. Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, UI-Press, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi, Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi, Ilmu Pemerintahan Baru*, Jilid 2. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Soekarno SD. MPA. Drs. 2001. *Publik Policy*. Airlangga University Press. Surabaya
- Soekarno SD. MPA. DRS. 2001. *Publik Policy*. Airlangga University Press, Surabaya
- Solichin, Abdul Wahab, M.A. 2002. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya
- Syafiie, Inu, Kencana. 2003. *Ekologi Pemerintahan*. PT. Perca, Jakarta
- Syafiie, Inu, Kencana, M. Si. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Rafika Aditama, Jakarta, 2003:157
- Syafiie, Inu, Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama, Jakarta
- Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2000*. Permata Press, Jakarta
- Winarno, Budi 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta

Dokumen-dokumen :

Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2009 *Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Camat Monografi Kecamatan Balikpapan Utara*

Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 22 Tahun 2008 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Balikpapan dan Kelurahan*

Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2006 *Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan*

Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008